

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan berbeda-beda, sehingga laporan yang disajikan tersebut harus berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan tersebut memenuhi syarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam PP No. 71 Tahun 2010 diungkapkan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, pegawai yang bekerja dalam pengelolaan keuangan harus memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka pemanfaatan teknologi justru akan mempersulit pekerjaan pegawai. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat mengawasi dan memberikan keyakinan tercapainya tujuan suatu organisasi menjadi penting, sehingga hal-hal yang telah direncanakan dapat terlaksana.

Selain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Selain wajib untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang memadai juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP 60 Tahun 2008): (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Dalam PP 60 tahun 2008, seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (Armando, 2013).

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, adanya kenaikan opini merupakan adanya perbaikan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Opini tidak memberikan pendapat (TMP), artinya auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu. Opini wajar dengan pengecualian (WDP), bahwa laporan keuangan yang diperiksa sebagian besar pos dalam laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan untuk pos-pos tertentu disajikan secara tidak wajar. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Opini WTP artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun

tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

**Table 1.1**  
**Opini BPK atas LKPD Provinsi Lampung**

No.	Pemda	2010	2011	2012	2013	2014
1	Provinsi Lampung	WDP	WTP DPP	WTP	WDP	WTPDP
2	Kab. Lampung Barat	WTP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Lampung Selatan	WTP	WTP DPP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Lampung	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
5	Kab. Lampung Timur	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Lampung Utara	TMP	WDP	TW	TW	WDP
7	Kab. Mesuji	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
8	Kab. Pesawaran	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
9	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	TMP
10	Kab. Pringsewu	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP
11	Kab. Tanggamus	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
12	Kab. Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
13	Kab. Tulang Bawang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK, IHP Semester 1 Tahun 2015

Dilihat dari tabel 1.1 diatas, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dari tahun anggaran 2010 hingga 2011, sempat mengalami penurunan tingkat opini yaitu opini dari wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP), yang berarti adanya penurunan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Penulis mengambil pemilihan lokasi penelitian pada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung karena selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun

2011 mengalami penurunan tingkat opini laporan keuangan daerah yang diberikan oleh BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah daerah Kota Bandar Lampung belum memadai yang disebabkan karena lemahnya system pengendalian intern pemerintah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan belum memadainya kompetensi sumber daya manusia. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya (Ambar, 2014, [www.teraslampung.com](http://www.teraslampung.com)).

Kebijakan dan sistem akuntansi belum seluruhnya diimplementasikan, pemuktahiran database SDM belum optimal juga tidak melaksanakan analisis kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk setiap hari dan fungsi. Ambar juga menyebutkan SDM pengelola keuangan aset dan Teknologi Informasi belum semua memiliki kompetensi, bahkan optimalisasi pengelola keuangan, aset TI belum memadai.

Beberapa penelitian berkenaan dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi antara lain; Penelitian Prapto (2010) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian Saleba (2014) menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian Karmita (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem

informasi akuntansi. Selanjutnya hasil penelitian Sudarsono (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan peneraapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Karmita (2015). yang menjadikan pegawai Balai Latihan Kerja Industri Makasar sebagai objek penelitian, Karmita (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kemudian berdasarkan penelitian Sudarsono (2016) penulis menambahkan variable sistem pengendalian intern sebagai salah satu variable independen yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi. menyatakan bahwa sistem pengendalian intern, Sudarsono (2016) menjadikan SKPD dilingkungan Kabupaten Grobogan sebagai objek penelitian, lalu menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, dan peneraapan sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah pegawai pada balai latihan kerja industri Makasar, sedangkan pada penelitian ini penulis menjadikan satuan perangkat kerja daerah kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bandar Lampung)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

### **1.5. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai efektivitas sistem informasi akuntansi pada SKPD di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah  
Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait efektivitas sistem informasi akuntansi.
3. Bagi Peneliti  
Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan dan akuntansi sektor publik.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.



#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**